

## **BAB II**

### **SITUASI MILITER DI SURAKARTA TAHUN 1948**

#### **A. Surakarta Masa Perang Kemerdekaan I 1947-1948**

Surakarta adalah salah satu kota yang menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak masa Kerajaan Mataram di Surakarta hingga masa perang kemerdekaan Indonesia. Surakarta tumbuh dan berkembang menjadi sebuah pusat kebudayaan Jawa Tradisional dengan keberadaan Kraton Surakarta sebagai simbol dan realitas yang dimulai ketika terjadi perpindahan Ibu Kota dari Kartasura ke Surakarta. Proses perpindahan Ibu Kota Mataram menurut pandangan para ahli nujum atau penasehat kerajaan Mataram di Kartasura menunjuk titik lokasi Kraton sekarang ini adalah tempat yang membawa perubahan dan harapan akan keadaan yang lebih baik.<sup>1</sup> Ramalan atau Pandangan itu benar adanya terjadi setelah Kraton dipindahkan ke Surakarta dan pemerintahan berlangsung di sana membangun sendi sendi kehidupan sosial ekonomi yang maju pesat hingga kedatangan Bangsa Belanda yang kemudian memecah Mataram menjadi Kasunanan di Surakarta dan Kasultanan di Yogyakarta. Mulai pada saat itu Surakarta menjadi salah satu catatan penting bagi para sejarawan dan para pelaku sejarah yang pernah singgah dan menorehkan catatan hidupnya di kota Surakarta serta menjadi bagian dari sejarah Kota Surakarta. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menandai babak baru dalam periodisasi sejarah Bangsa Indonesia. Jakarta yang

---

<sup>1</sup> Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1839*, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1989), hlm. 19.

merupakan bekas Ibu Kota Hindia Belanda yang dulunya bernama Batavia menjadi saksi bagaimana kemerdekaan Bangsa Indonesia diikrarkan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Kota Surakarta menjadi bagian dari masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak masa pergerakan nasional dengan berdirinya organisasi-organisasi pelajar pribumi maupun organisasi dagang dan organisasi berbasis keagamaan dan pada masa setelah kemerdekaan, Surakarta tetap menjadi sorotan atau kota yang diperhitungan sebagai basis perjuangan. Berpindahnya Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta yang disebabkan oleh keadaan Jakarta yang tidak aman.<sup>2</sup> Situasi ini disebabkan karena konflik antara sekutu dan *Nedherlands Indhisce Civil Administration* (NICA) melawan kekuatan Republik di Jakarta yang semakin memanas dan perjuangan melalui diplomasi yang mengalami kebuntuan sehingga Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin tidak bisa menenangkan rakyat atau dalam hal ini para pejuang golongan muda khususnya yang ingin menghancurkan musuh.

Pemilihan Yogyakarta sebagai Ibu Kota negara adalah karena tawaran yang diberikan Sultan kepada Sukarno melalui seorang kurir yang berangkat dari Yogyakarta pada 2 Januari 1945.<sup>3</sup> Perpindahan Ibu Kota ke Yogyakarta ini secara otomatis membawa serta perangkat pemerintahan Republik Indonesia serta

---

<sup>2</sup> Julianto Ibrahim, *Bandit Pejuang di Simpang Bengawan; kriminalitas dan kekerasan masa revolusi di Surakarta*, (Surakarta: Bina Citra Pustaka, 2004), hlm. 101.

<sup>3</sup> Sebuah Presentasi Majalah TEMPO, *Sri Sultan: Hari-Hari Hamengkubuwana IX* (Jakarta:Grafiti Press,1988), hlm. 34.

berbagai macam masalah yang tidak bisa sepenuhnya dihindari di Jakarta. Kekuatan oposisi pemerintahan menjadi salah satu permasalahan Republik yang menjadi duri dalam daging dalam sebuah pemerintahan yang baru saja lahir. Surakarta dipilih menjadi markas kekuatan oposisi kelompok kiri yang dipimpin Tan Malaka berserta kekuatan-kekuatan baik partai politik maupun badan-badan perjuangan yang mendukungnya.<sup>4</sup> Surakarta menjadi lokasi yang strategis untuk terus mengoyak pemerintahan Republik di Yogyakarta dan menggerogoti Kabinet Sutan Syahrir yang memilih jalan diplomasi dengan Pemerintah Belanda. Kekuatan oposisi di bawah Tan Malaka tidak saja menimbulkan masalah Politik, tetapi juga masalah-masalah sosial. Gerakan-gerakan anti swapraja ini menyebabkan kedudukan Kraton menjadi sangat lemah dan sulit, sehingga status swapraja di Surakarta dapat dengan mudah diruntuhkan. Kabinet Sutan Syahrir bersama pemerintahan Republik yang mengetahui perihal pergerakan golongan oposisi di Surakarta kemudian berani mengambil tindakan dengan mempertaruhkan diri untuk mendukung kedua Kraton dengan konsekuensi kedudukannya yang teroposisi sebagaimana Kraton dioposisi oleh kelompok-kelompok Komunis atau golongan kiri Tan Malaka.<sup>5</sup> Selain itu, pemerintah pusat berusaha melindungi harta milik Kraton dan pabrik-pabrik agar tidak jatuh ke tangan kaum oposisi pimpinan Tan Malaka dan persatuan perjuangannya.

Tan Malaka bersama badan-badan perjuangannya yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama “Persatuan Perjuangan” yang terbentuk di Purwokerto

---

<sup>4</sup> Julianto, *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>5</sup> *Ibid.* , hlm. 156.

pada 4 Januari 1946 menetapkan Surakarta sebagai pusat kegiatan dengan “Minimum Program” sebagai tujuan organisasi.<sup>6</sup> Gerakan ini melakukan aksi-aksi penculikan dan kekerasan di Surakarta serta meluncurkan pernyataan-pernyataan yang memicu kekacauan di Surakarta salah satunya adalah keluarnya maklumat Markas Barisan Banteng Surakarta tanggal 18 Mei 1946 yang isinya adalah tuntutan penghapusan swapraja di Surakarta, maklumat yang kemudian direspon oleh golongan extrim dari Barisan Banteng berlanjut dengan aksi-aksi penculikan terhadap tokoh tokoh penting istana. Aksi penculikan ini sebelumnya sudah terjadi pada Januari 1946 di mana Barisan Banteng menculik Susuhunan, Kanjeng Ratu dan Soerjohamidjojo<sup>7</sup> dan berikutnya pada 18 April 1946 Barisan Banteng kembali masuk ke dalam Kraton dan menahan Susuhunan di istananya agar bersedia menyerahkan wewenangnya kepada rakyat.<sup>8</sup> Disebutkan bahwa kesatuan Barisan Banteng mengutus Dr. Muwardi, Mangkusudiyo dan Hadi Sunarto untuk menekan secara paksa Patih Partono Handoyonoto di Mangkunegaran agar bersedia menerima lenyapnya pemerintahan swapraja Mangkunegaran dan bersedia bergabung dengan Pemerintah RI.<sup>9</sup>

Kondisi pemerintahan swapraja Surakarta semakin terdesak ketika tuntutan pembubaran Daerah Istimewa Surakarta terus berjalan, badan-badan perjuangan

---

<sup>6</sup> Ben Anderson, *Revoeloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa* (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 298.

<sup>7</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University,1995), hlm. 468.

<sup>8</sup> *Merdeka*, 2 Mei 1946.

<sup>9</sup> *Kedaulatan Rakyat* , 25 April 1946.

beberapa komponen masyarakat di Klaten dan Boyolali menuntut dihapusnya swapraja Surakarta. Guru-guru di Wonogiri dan Tawangmangu menyatakan lepas hubungan dengan Mangkunegaran dan menuntut pemilihan umum secara demokratis. Tanggal 23 Mei pemerintahan dari 4 kabupaten<sup>10</sup> memutuskan hubungan dengan Sunan.<sup>11</sup> Situasi Surakarta yang semakin rumit kemudian melahirkan keputusan baru yaitu dengan mengangkat perwakilan pemerintah Pusat di Surakarta lewat maklumat dr. Soedarsono tanggal 23 Mei 1946 untuk mengembalikan suasana kondusif Surakarta dan mengambil tindakan untuk orang-orang yang telah melanggar aturan pemerintah. Agung A.K. Soerjo diangkat menjadi menjadi perwakilan Pusat di Surakarta dengan harapan dapat memecahkan persoalan dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Pusat.<sup>12</sup> Agung A.K. Soerjo memerintahkan penangkapan atas tokoh-tokoh oposisi diantaranya Dr. Muwardi, Mangkusudiyono, Mulyadi Joyomartono dan Hadisunarto, Dr. Muwardi ditahan di Yogyakarta dan yang lainnya di Surakarta.<sup>13</sup> Penangkapan Dr. Muwardi berserta rekan-rekannya memicu gelombang demonstrasi massa yang

<sup>10</sup> Empat kabupaten yang menyatakan melepaskan diri dan menarik dukungan terhadap Kraton yaitu Klaten, Boyolali, Wonogiri dan Karanganyar. Julinto, op.cit., hlm 160. Meskipun dari sumber hanya disebutkan daerah-daerah kabupaten menyatakan melepaskan perhubungan dengan Pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran, namun dari sumber *Kedaulatan Rakyat*, 25 April 1946, jelas bahwa provokasi Tan Malaka berhasil menguasai dan memiliki pengaruh kuat di empat kabupaten tersebut. Lihat lampiran 1 : *Arsip Kodam VII Diponegoro, Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta 15 September 1950*.

<sup>11</sup> Roentoehnya Swapradja Surakarta, *Arsip Rekso Pustoko*, no.S.288,

<sup>12</sup> Lihat lampiran 1 : *Arsip Kodam VII Diponegoro, Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta, Mei 1946*.

<sup>13</sup> *Banteng*, 2 Mei 1946.

memuncak pada tanggal 28 Mei 1946 dalam rapat umum yang diikuti oleh Barisan Banteng, Hisbullah dan Polisi Istimewa. Rapat umum ini menghasilkan tuntutan atau lebih tepat dikatakan ancaman kepada pemerintah pusat untuk segera membebaskan para tahanan, Agung A.K. Soerjo yang diharapkan mampu menguasai keadaan Surakarta tidak mampu mengendalikan keadaan.<sup>14</sup> Tanggal 31 Mei 1946 pemerintah akhirnya membebaskan para tahanan dari kaum oposisi sebagai hasil dari perundingan Polisi Istimewa Surakarta dan Agung A.K. Soerjo serta Jendral Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang yang bertugas menjamin keamanan berbagai satuan militer reguler maupun kelaskaran. Pembebasan para tahanan itu menjadi pukulan kejiwaan bagi pemerintah karena kelompok oposisi seolah mendapat perlindungan dan kebal terhadap campur tangan pemerintah.

Sidang kabinet darurat kemudian dilangsungkan menyusul kegagalan pemerintah mengatasi gempuran kelompok oposisi. Sidang kabinet darurat tersebut menghasilkan putusan untuk membentuk suatu pemerintahan militer di Surakarta dengan pertimbangan keadaan yang tidak bisa dikendalikan.<sup>15</sup> Pemerintahan militer yang dibentuk disebut Pemerintahan Daerah Rakyat dan Tentara (PDRT) yang diprakarsai Kolonel Soetarto sebagai komandan divisi IV Surakarta dengan maklumat No.1 tanggal 1 Juni 1946.<sup>16</sup> Terbentuknya

---

<sup>14</sup> Ben Anderson, *op. cit.*, hlm. 398.

<sup>15</sup> Julianto, *op. cit.*, hlm. 164.

<sup>16</sup> Lihat lampiran 1 : *Arsip Kodam VII Diponegoro, Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta, 1-6-1946*.

pemerintahan militer ini kemudian menyatukan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran di bawah pimpinan tentara. Berlakunya Pemerintahan Darurat Militer Surakarta ini ternyata belum mampu memperbaiki keadaan, keadaan darurat Surakarta berlanjut dengan penculikan atas Sutan Syahrir pada 27 Juni 1946. Penculikan ini dilakukan oleh golongan oposisi di bawah perintah Jendral Sudarsono yang kemudian Sutan Syahrir ditawan di Paras, lereng Gunung Merbabu dan dijaga oleh Soekarto, komandan Batalyon setempat.<sup>17</sup> Penculikan ini menyulut konflik dan ketegangan antara para petinggi negara diantaranya Sukarno, Muhammad Hatta, Amir Syarifudin dan kembali nama Tan Malaka<sup>18</sup> disebut sebagai dalang penculikan Sutan Syahrir tersebut hingga puncaknya terjadi peristiwa penyerangan terhadap istana Presiden di Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan peristiwa 3 Juli. Penyerangan ini dilakukan oleh Jendral Sudarsono, namun usaha kudeta ini berhasil digagalkan oleh kesatuan Pesindo yang mengawal gedung istana Presiden di Yogyakarta. Peristiwa 3 Juli itu kemudian membawa dampak juga bagi Surakarta yaitu pemenuhan tuntutan

---

<sup>17</sup> Kodam VII Diponegoro, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia* (Semarang:1963), hlm.27.

<sup>18</sup> Penculikan terhadap Sutan Syahrir membuat Sukarno marah sekaligus prihatin dengan tindakan oposisi yang berlebihan, menurutnya orang yang melakukan aksi penculikan membayangkan dirinya “lebih kiri dari kiri, dan lebih radikal dari radikal”. Ungkapan itu seolah ditujukan untuk Tan Malaka yang oleh beberapa pihak diyakini sebagai orang yang bertanggungjawab atas penculikan itu. Lihat : Julianto, *op. cit.*, hlm. 165

golongan oposisi oleh pemerintah berupa pembekuan kekuasaan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran dalam urusan pemerintahan kota Surakarta<sup>19</sup>.

Gejolak politik pemerintahan Republik di Yogyakarta dan oposisinya di Surakarta berlanjut dengan jatuhnya kabinet Sutan Syahrir pada tanggal 26 Juni 1947 dalam rapat kabinet di Yogyakarta. Sutan Syahrir dikhianati oleh rekannya yang tidak mendukung dalam mensosialisasikan perjanjian Linggarjati, teman-teman Sutan Syahrir dari Partai Sosialis seperti Abdulmajid, Tan Ling Djie, Wikana dan Amir Syarifudin menyerang kebijaksanaan Sutan Syahrir dan memberikan konsesi pada perjanjian Linggarjati. Sutan Syahrir kemudian menyerahkan jabatan perdana menteri kepada Presiden Sukarno dan Sukarno menunjuk Amir Syarifudin menjadi perdana menteri dan membentuk kabinet baru tanpa mengikutkan kelompok Sutan Syahrir didalamnya.<sup>20</sup>

Jatuhnya kabinet Sutan Syahrir kemudian diikuti oleh serbuhan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jendral Spoor memasuki Republik dengan bantuan Angkatan Udara dan berhasil menduduki kota-kota besar sebagai pangkalan pendongkrak ekonomi Belanda. Kabinet Amir Syarifudin yang sudah terbentuk mendapat dukungan penuh dari golongan kiri dan puji-pujian pada menteri menterinya yang juga merupakan antek-antek golongan kiri yang dipilih sendiri

---

<sup>19</sup> ANRI, Penetapan Pemerintah No.16/S.D.Tahun 1946, *Tentang perubahan bentuk dan susunan Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta. 15 juli 1946.*

<sup>20</sup> Tan Malaka dan para pengikutnya sebenarnya telah dua kali berhasil menjatuhkan Syahrir sebagai perdana menteri. Kabinet Syahrir I jatuh pada tanggal 28 Februari 1946 setelah mendapat tekanan dari Persatuan Perjuangan. Lihat: *Kedaulatan Rakyat*, 1 Maret 1946.

oleh Amir Syarifudin. Kemenangan Amir Syarifudin ternyata hanya berumur singkat, serbuan Belanda di bawah Jendral Spoor memberikan pukulan psikologis bagi pemerintah Republik dengan adanya campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Belgia, Australia dan Amerika Serikat dalam penyelesaian masalah Indonesia-Belanda. KTN ini mengarahkan Republik pada perundingan yang digelar di atas kapal perang Amerika U.S.Renville yang kemudian menghasilkan Perjanjian Renville 17 Januari 1948.<sup>21</sup> Perjanjian Renville ini menjadi titik awal jatuhnya kabinet Amir Syarifudin di mana muncul protes dan kekecewaan kelompok-kelompok politik yang menentang Perjanjian Renville diantaranya Masyumi, PNI, kelompok Syahrir dan Tan Malaka yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Tanggal 16 Januari 1948 Masyumi dan PNI melepaskan diri dari kabinet sehingga Amir Syarifudin kehilangan dukungan utamanya. Gelombang protes yang terus datang dan menyadari dirinya telah dikhianati oleh rekan-rekannya seperti dulu Sutan Syahrir juga pernah mengalami pengkhianatan oleh pendukung-pendukungnya di golongan kiri yang salah satunya dirinya, Amir Syarifudin akhirnya meletakkan jabatannya pada 23 Januari 1948<sup>22</sup> dan berakhirlah kabinet golongan kiri yang mengandalkan politik diplomasi dan harapan atas analisis perkembangan dunia membawa kekacauan untuk Republik Indonesia yang hanya tinggal sepertiga wilayahnya.

---

<sup>21</sup> Soe Hok Gie, *Orang Orang di Persimpangan Kiri Jalan*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), hlm. 127.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

Perjanjian Renville hasil dari pemerintahan kabinet Amir Syarifudin masih berlanjut dan memberikan persoalan baru bagi kota Surakarta yang masih belum terkondisikan dengan diberlakukannya Pemerintahan Darurat Militer Surakarta. Dari hasil perjanjian Renville yang salah satu pointnya menyebutkan bahwa tentara Republik harus ditarik ke wilayah RI sesuai garis demarkasi Van Mook.<sup>23</sup> Surakarta yang menjadi salah satu wilayah yang masih dimiliki Republik Indonesia harus bersedia menampung prajurit hijrah yang ditarik dari wilayah luar dalam hal ini adalah pasukan Siliwangi yang hirjahnnya akan dijelaskan dalam bab berikutnya. Tahun 1948 memang menjadi puncak kekacauan di Surakarta, mulai dari segi keamanan, sosial, ekonomi, politik hingga militer di Surakarta saling melengkapi peliknya permasalahan yang terjadi. Kedatangan pasukan hijrah pergolakan golongan kiri sebagai oposisi pemerintah masih terus berlanjut dengan memanfaatkan keadaan yang tidak terkendali di Surakarta.

## **B. Kesatuan Militer yang berdomisili di Surakarta Tahun 1948**

Penjajahan di Indonesia baik oleh Kolonial Belanda maupun oleh Jepang telah menorehkan catatan tersendiri dalam perjalanan sejarah militer di Indonesia. Bidang kemiliteran memang sudah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan di nusantara, namun dalam hal ini Kolonial Belanda dan Jepang telah mewariskan gaya kemiliteran profesional yang kemudian setelah proklamasi kemerdekaan militer memegang peran penting dalam perang kemerdekaan I, dan II melawan

---

<sup>23</sup> Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember 1948, Jendral Spoor(Operate Kraai) versus Jendral Sudirman(Perintah Siasat No.1)*(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 102.

Sekutu Belanda yang ingin kembali menancapkan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Pemuda pemuda Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan yang cakap dilatih dan dijadikan anggota kemiliteran pada masa penjajahan Belanda tergabung dalam *Koninklijke Nedharland Indhisce Leger* (KNIL) dan pada masa penjajahan Jepang adalah pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Dua jenis prajurit ini dibentuk dan dilatih pada masa yang berbeda dan oleh pelatihan yang berbeda pula yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya tentara resmi di Indonesia yang sekarang bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Angkatan Perang Republik Indonesia yang sebenarnya sudah bisa dibentuk segera setelah proklamasi kemerdekaan sebagai suatu tentara resmi negara. Sudah ada 60 *Daidan* (setingkat Batalyon) PETA, ribuan prajurit *Heiho* dan prajurit semi militer lain bentukan Jepang, namun mereka dibubarkan dan Sekutu harus menerima kemerdekaan Indonesia sebagai penentuan nasib sendiri seperti yang dikemukakan pimpinan Amerika dan Inggris ketika mengakhiri Perang Dunia II.<sup>24</sup>

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta oleh Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta menimbulkan reaksi cepat di daerah-daerah untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan di daerah dari tangan Jepang. Perebutan Senjata dan kantor-kantor pemerintahan di Surakarta berjalan tanpa kontak senjata, penyerahan kekuasaan wilayah Surakarta dilakukan langsung oleh Chokankaka Watanabe secara damai kepada bangsa Indonesia yang diwakili oleh Mr.B.P.H.Soemodiningrat selaku ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Surakarta.<sup>25</sup> Penyerahan kekuasaan oleh Jepang yang berjalan damai ini tidak diikuti dengan penyerahan markas *Kempetai* (Polisi Rahasia Jepang) di Surakarta, Komandan *Kempetai* Kapten Sato bersikeras tidak akan menyerahkan markas dan persejataan *Kempetai* kepada Komite Nasional Indonesia (KNI) Surakarta sebelum mendapat perintah langsung dari Tenno Heika. Sikap ini akhirnya memaksa pemuda-pemuda Surakarta menyerbu markas *Kempetai* di pinggir Jalan Purwosari kota Surakarta karena merasa dipermainkan oleh Kapten Sato. Penyerbuan markas *Kempetai* pada 13 Oktober 1945<sup>26</sup> diwarnai pertempuran antara pemuda dan prajurit *Kempetai*, serbuan pemuda dari berbagai arah akhirnya mampu melumpuhkan perlawanan *Kempetai* dan mengibarkan bendera putih tanda menyerah.

Keberhasilan KNI dan pemuda Surakarta merebut dan melucuti senjata Jepang melalui pertempuran tentu saja tidak lepas dari peran laskar-laskar rakyat yang telah terbentuk pada masa penjajahan Jepang. Laskar-laskar rakyat itu antara lain adalah *Seinendan* (Barisan Pemuda) dan *Keiboden* (Organisasi Keamanan) yang dibentuk pada 29 April 1943, *Heiho* (Pembantu Prajurit) dan *Boei Giguyun* (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air) dibentuk pada 7 September 1943, serta *Shusintai* (Barisan Pelopor) dibentuk pada 14 September 1944.<sup>27</sup> Pemuda-pemuda yang tergabung dalam laskar rakyat itu telah mendapatkan latihan kemiliteran sehingga bukan tidak mungkin mereka dapat menyerbu dan menguasai markas

---

<sup>25</sup> Julius Pour, *Ign. Slamet Riyadi; Dari Mengusir Kempetai sampai Menumpas RMS*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 25.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>27</sup> Julianto, *op. cit.* , hlm. 98.

*Kempetai* Surakarta. Laskar-laskar dan organisasi militer ini kemudian dibubarkan oleh Jepang pada 19 Agustus 1945 menyusul kekalahan Jepang dan perpindahan kekuasaan Jepang kepada Republik Indonesia. Pemuda pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi semi militer itu tidak membubarkan diri seperti yang diperintahkan oleh Jepang, mereka membentuk Angkatan Muda Tentara (AMT) yang terdiri dari bekas anggota PETA, *Heiho*, Legiun Mangkunegaran, Barisan Pelopor, Hisbullah, dan *Jibakutai*. Laskar-laskar ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) hingga pada masanya setelah melalui proses yang panjang menjelma menjadi satuan militer profesional dalam satu wadah TNI sebagai tentara resmi di suatu negara merdeka.

Pemuda-pemuda Surakarta yang pernah mendapat pelatihan militer Jepang antara lain adalah Moeljadi Djojomartono, Moch.Idris, Mr. Soemodiningrat, Soetarto, Achmad Fadjar, GPH. Poerbonegoro, Soenarto Koesoemodirdjo, GPH. Jatikoesoemo, dan Sastowihardjo. Tokoh tokoh ini yang kemudian menjadi pemimpin berbagai laskar rakyat yang lahir di Surakarta dan menyatakan diri sebagai pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Nama Soetarto erat sekali hubungannya ketika membicarakan militer Surakarta masa revolusi, Soetarto mengawali karir militernya dengan menjadi komandan kompi pasukan Pembela Tanah Air di Wonogiri pada masa pendudukan Jepang yang kemudian aktif dalam pembentukan organisasi sel anti Jepang di Wonogiri yang dikenal dengan nama

Ikatan Putera Tanah Air Sejati (IPTAS) yang terbuka bagi seluruh anggota PETA berpangkat komandan pleton ke bawah.<sup>28</sup>

Nama Soetarto semakin dikenal ketika pada akhir Oktober 1945 diadakan pertemuan darurat seluruh komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan laskar di wilayah Surakarta untuk membicarakan sifat dan tujuan masa depan kekuatan militer di kota Solo. Dalam pertemuan itu digelar pemilihan jabatan komandan divisi yang diikuti Poerbonegoro, Soetarto, dan Soenarto dengan hasil aklamasi menunjuk Soetarto sebagai komandan Divisi TKR Solo.<sup>29</sup> Terpilihnya Soetarto bukan karena reputasinya sebagai tokoh terkemuka yang anti Jepang, namun lebih pada kedekatannya dengan gerakan pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Tentara (AMT). Soetarto sebagai seorang bekas perwira PETA yang masih muda mampu memiliki pengaruh dan pengikut yang sedemikian besar serta menduduki posisi penting dalam jabatan ketentaraan. Perjalanan karir Soetarto rupanya tidak sebaik awal masuknya dalam dunia militer, jabatannya sebagai Komandan Pertempuran Divisi IV Panembahan Senopati digoyahkan dengan pemberlakuan Pemerintah Darurat Rakyat dan Tentara di mana pemerintah menempatkan Mayjen Sudiro dari TKR divisi Kediri untuk mengambil alih komando di Solo. Langkah ini nampaknya tidak efektif dan akhirnya pemerintah mengakui Soetarto sebagai Panglima Divisi Senopati dengan pangkat Mayor

---

<sup>28</sup> Sedjarah TNI AD Kodam VII Diponegoro : *Sirnaning Jakso Katon Gapuranaing Ratu*, (Semarang :Jajasan Penerbit Diponegoro, 1968), hlm. 16.

<sup>29</sup> David Charles Anderson, *Kudeta Madiun 1948*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm. 18.

Jendral.<sup>30</sup> Pemerintahan militer itu akhirnya memantapkan posisi Soetarto memimpin Surakarta dengan pemerintahan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran berada di bawah komando tentara.<sup>31</sup> Pemerintah Militer ini dijalankan oleh badan pekerja yang berjumlah 6 orang, terdiri dari Soediro mBah, Soediro dari Barisan Banteng, Soemodiharjo dari PBI, Soejono dari KNI, Joewardi dan Soetarto. Tanggal 2 juni, Soetarto memimpin sendiri pelantikan rezim baru ini.<sup>32</sup>

Rencana Reorganisasi Muhammad Hatta juga pernah mengancam kedudukan Soetarto sebagai Panglima Panembahan Senopati dan kesatuan yang dalam jumlah besar dan dinilai tidak memadai dari segi pendidikan militer dibandingkan dengan pasukan Siliwangi yang banyak memiliki perwira berpendidikan label negeri Belanda. Soetarto yang juga menentang Reorganisasi melakukan aksi protes dalam sebuah parade militer di mana Sutarto bersama pasukan Panembahan Senopati bersenjata lengkap pada 20 Mei 1948 di Solo mengajukan tuntutan agar pemerintah membatalkan rencana Reorganisasi karena dinilai tidak relevan atau tidak tepat waktu, karena bangsa Indonesia tengah menghadapi tekanan dari dalam maupun luar negeri. Aksi protes dan pembangkangan terhadap kebijakan dan kabinet Hatta ini juga diikuti oleh batalyon Pesindo dan batalyon Tentara

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>31</sup> Julianto, *op. cit.*, hlm. 164.

<sup>32</sup> *Merdeka*, 3 dan 4 Djuni 1946. Lihat lampiran 2 : Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran, Surakarta. Maklumat No.2, Tanggal 1 Juni 1946

Laut Republik Indonesia (TLRI) bersenjata berat.<sup>33</sup> Tekanan terhadap Panembahan Senopati justru membuat mereka semakin tak terkendali karena mereka mendapatkan dukungan politis dari FDR yang memang memiliki ikatan pertemanan di antara pemimpin-pemimpinnya.

Rencana Reorganisasi yang diajukan melalui A.H.Nasution diabaikan begitu saja dan justru pada Juni 1948 terjadi pemantapan formasi dan nama baru yaitu Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) di bawah pimpinan Mayor Jendral Soetarto dengan susunannya Panglima Mayjen Sutarto (Panglima Divisi Senopati), Brigade V di bawah Komandan Letkol Suadi (Mantan Komandan Res XXVI Solo) yang membawahi batalyon Suharto (Mantan Komandan TKR Solo), batalyon Sudigdo (Komandan Batalyon di Solo), batalyon Sunitiyoso (Mantan Komandan TKR Klaten), batalyon Slamet Riyadi (Mantan Komandan TKR Pacitan).

Brigade VI di bawah Komandan Letkol S.Sudiatro (Mantan Komandan Res XXIV Kendal), membawahi batalyon Purnawi (Mantan Komandan TKR Weleri), batalyon Yusmin (Mantan Komandan TKR Purwodadi), batalyon Kusmanto (Mantan Komandan TKR Solo). Brigade VII di bawah Komandan Letkol A.Yadau membawahi batalyon Suyadi, batalyon Marjono, batalyon Sutarno, batalyon Esmara Sugeng. Brigade VIII di bawah Komandan Letkol Suyoto (Mantan Komandan Brigade TLRI). Brigade IX di bawah Komandan Letkol Holland Iskandar (Mantan Kom Brigd 24 TNI Masyarakat) membawahi batalyon Jalimin (Mantan Kom Res V BPRI), batalyon Munawar (Mantan Kom Res VI

---

<sup>33</sup> A.H.Nasution, *Tentara Nasional Indonesia II*, ( Jakarta: Seruling Masa 1968), hlm. 184.

Hizbulah), batalyon Suwitoyo (Mantan Kom Res IV Pesindo), batalyon Sudrajat (Mantan Kom Res I Laskar Rakyat).<sup>34</sup>

Keberadaan tokoh-tokoh Surakarta yang terlatih secara militer juga membawahi pasukan-pasukan semi militer berbentuk kelaskaran yang bermarkas di Surakarta. Laskar-laskar itu diantaranya adalah Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), Laskar Buruh Indonesia, Laskar Merah, Laskar Gajah Mada, Laskar Putri Indonesia, Hisbullah, Sabilillah, Barisan Banteng, Laskar Kere, Laskar Janget, Laskar Pelita, Laskar Alap-alap, Pesindo, Angkatan Muda Arab Indonesia (AMAI), dan Tentara Pelajar. Keberadaan laskar-laskar rakyat ini kemudian berkembang sesuai ideologi dan identitas serta wilayah berdomisilinya masing-masing. Tujuan membela kemerdekaan Republik Indonesia hanya merupakan pemersatu organisasi kelaskaran ini. Badan kelaskaran ini juga mempunyai tujuan tersendiri untuk mengusung kepentingan kelompoknya masing-masing. Berkembangnya laskar rakyat ini selanjutnya bergabung dengan partai-partai politik dan terlibat dalam konflik politik yang terus bergejolak selama masa revolusi.

Laskar-laskar yang bergabung dengan partai politik antara lain adalah Pesindo yang bergabung dengan Partai Sosialis, Barisan banteng bergabung dengan Persatuan Perjuangan Tan Malaka, Laskar Rakyat mendukung Partai Komunis Indonesia, dan Hisbullah mendukung Masyumi.<sup>35</sup> penggabungan ini

---

<sup>34</sup> Sedjarah Militer Kodam VII, Diponegoro *op. cit.*, hlm. 135.

<sup>35</sup> Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia, 1945-1966* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1971), hlm. 36.

kemudian justru memunculkan permasalahan baru yaitu pertentangan antar badan-badan perjuangan karena mengusung bendera masing-masing dalam keikutsertaannya dalam pergolakan politik yang terjadi. Keadaan Surakarta semakin kritis karena kondisi tersebut hingga akhirnya dikeluarkan maklumat 5 Mei 1947 tentang penggabungan TRI dan laskar-laskar bersenjata menjadi satu organisasi milliter<sup>36</sup> dan menyusul Dekrit Presiden 3 Juni 1947 tentang peleburan seluruh angkatan bersenjata dan laskar-laskar dalam satu wadah organisasi kemiliteran bernama TNI (Tentara Nasional Indonesia). Di Surakarta sendiri realisasi Dekrit 3 Juni dilaksanakan dengan tertib dan terbentuk satu Brigade bernama Brigade 24 di bawah Divisi IV Panembahan Senopati dengan komandannya Kolonel Iskandar<sup>37</sup>. Brigade 24 Surakarta terdiri dari 6 Resimen dan 2 Batalyon yaitu Resimen I dari Laskar Rakyat di bawah Kolonel Subandi, Resimen II dari Barisan Banteng di bawah Letnan Kolonel Sanusi Anwar, Resimen III dari BPRI Surakarta di bawah Letnan Kolonel Gunarjo, Resimen IV dari Pesindo di bawah Letnan Kolonel Budiharjo, Resimen V dari BPRI Semarang di bawah Letnan Kolonel Mardjuki, Resimen IV dari Hisbullah dan Sabilillah di bawah Letnan Kolonel Munawar, sedang untuk 2 Batalyonnya terdiri dari Batalyon 23 Laskar Alap-Alap di bawah Mayor Saridi dan Depot Batalyon dari Markas Besar Tentara (MBT) di bawah Mayor Sangidu.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Julianto, *op. cit.*, hlm. 100.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Soeprijadi Joesoef Marodihardjo, *Barisan Banteng Republik Indonesia Surakarta Dalam Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia 1945-1950* (Skripsi, Fakultas Sastra UGM, 1984), hlm.30.

Keberadaan kesatuan-kesatuan militer di Surakarta yang beragam semakin lengkap dengan datangnya prajurit hijrah Siliwangi dari Jawa Barat sebagai akibat dari perjanjian Renville. Prajurit Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah dikelompokkan dalam dua Brigade Utama yaitu Brigade Letnan Kolonel Kusno Utomo yang berbasis di Yogyakarta, di dalamnya terdapat batalyon-batalyon yang dipimpin oleh Mayor Kemal Idris, Mayor A.Kosasih, Mayor Daeng, dan Mayor Ahmad Wiranata Kusumah. Brigade kedua dipimpin oleh Letnan Kolonel Sadikin yang ditempatkan di Surakarta dan di dalamnya terdapat batalyon batalyon yang dipimpin Mayor Rukman, Mayor Umar, Mayor Sambas, dan Mayor Sentot Iskandardinata. Selain dua brigade utama ini juga terdapat brigade cadangan Siliwangi di Magelang di bawah Letnan Kolonel Eddy Sukardi.<sup>39</sup>

### **C. Rencana FDR Menjadikan Surakarta menjadi wilayah *wild west***

Beberapa kondisi penunjang yang kemudian menjadikan Surakarta sebagai target wilayah kacau atau *wild west* diantaranya adalah posisi Ibu Kota Negara yang berada di Yogyakarta relatif dekat dengan Surakarta sehingga Surakarta menjadi lokasi berpusatnya golongan para oposisi pemerintah, Surakarta menjadi tempat memantau arah kebijakan pemerintah dalam usaha diplomasinya dengan Belanda dan juga sebagai kota tawanan di mana keberadaan golongan oposisi selalu mengancam jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Kemelut politik pemerintahan Kota Surakarta sendiri dengan tekanan dari pihak GRR dan

---

<sup>39</sup> Sedjarah Militer Kodam VI/Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Fakta Mahjuma, 1968), hlm. 140-141.

golongan kiri yang menginginkan pembubaran pemerintahan swapraja Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran diperparah dengan aksi-aksi kriminal dan penculikan. Berdomisilinya berbagai macam badan perjuangan dan laskar-laskar rakyat di Surakarta yang saling bertentangan setelah bergabungnya laskar-laskar itu dengan partai-partai politik memicu kecurigaan akan arah perjuangan dan konflik kepentingan masing-masing golongan badan perjuangan. Puncaknya adalah kekecewaan rakyat dan beberapa tokoh pemerintahan dan Militer terhadap penandatanganan persetujuan Renville 17 Januari 1948 oleh kabinet Amir Syarifudin yang membawa kerugian besar bagi Republik Indonesia dan yang paling berdampak bagi Surakarta adalah masuknya tentara Siliwangi ke Surakarta sebagai salah satu hasil dari persetujuan yang merugikan itu. Masuknya tentara Siliwangi akan dijelaskan pada bab berikutnya dari tulisan ini.

Persetujuan Renville menjadi satu-satunya yang dihasilkan dari kabinet Amir Syarifudin dan ibarat pisau bermata dua yang memangkas ke kiri atau ke kanan, persetujuan Renville ini selain merugikan pemerintah Republik Indonesia juga menjatuhkan Amir Syarifudin sendiri selaku Perdana Menteri bersama kabinetnya pada 23 Januari 1948.<sup>40</sup> Kabinet selanjutnya dipimpin oleh Muhammad Hatta yang menyusun kabinetnya tanpa satu pun menggunakan orang dari kelompok Amir Syarifudin menimbulkan kekecewaan dikalangan golongan kiri. Kebijakan Rasionalisasi yang memangkas jumlah anggota TNI, peleburan Divisi Panembahan Senopati, dan pembubaran TNI Masyarakat yang merupakan kekuatan besar pendukung Amir Syarifudin semakin menekan golongan kiri.

---

<sup>40</sup> Jacque Leclerc, “Amir Syarifudin 75 Tahun”, *Prisma* 1982, hlm. 74-75.

Kekecewaan itu menjadi landasan terbentuknya Front Demokrasi Rakyat (FDR), organisasi yang terbentuk pada 26 Februari 1948 atas gabungan dari PS , PKI, Partai Buruh, Pesindo dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).<sup>41</sup> Berdirinya FDR sebagai organisasi yang mewadahi kekuatan-kekuatan komunis di Indonesia kemudian melakukan langkah balasan atas perlakuan pemerintah terhadap golongan kiri yaitu dengan aksi-aksi propaganda melalui rapat-rapat umum, kampanye, pers, pamflet, poster maupun radio. Aksi-aksi FDR itu adalah bentuk protes terhadap pemerintahan Muhammad Hatta yang bersama kabinetnya banyak sekali mengeluarkan kebijakan yang merugikan komunis, aksi itu adalah menciptakan krisis keamanan di Surakarta dengan menculik orang-orang yang menentang FDR.

FDR juga menjalankan aksi dalam bidang militer dengan menetapkan rencana “Menginjak Perjuangan Militer Baru”<sup>42</sup> melalui jalur parlemen yaitu menuntut pembubaran kabinet Muhammad Hatta untuk selanjutnya segera dibentuk kabinet baru dan dengan diperkirakan 35% kekuatan militer berpihak kepada komunis, menjadikan Madiun sebagai basis gerilya perjuangan jangka panjang dan salah satu pointnya menyebut bahwa kota Surakarta akan dijadikan *wild west* atau kawasan kacau guna memecah konsentrasi pemerintah dan memudahkan pembentukan basis pasukan di Madiun. Dokumen yang ditemukan dan diduga adalah milik FDR berisi demikian.

- a. Untuk mempengaruhi Parlemen Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) maka perlu mengusulkan agar program nasional menjadi

---

<sup>41</sup> Julianto, *op. cit.*, hlm. 167.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

- program pemerintah. Dengan demikian maka kabinet yang berkuasa harus dibubarkan dan diganti dengan kabinet baru yang bertanggung jawab kepada parlemen;
- b. Mempercepat pembentukan front nasional terutama front nasional di daerah-daerah.
  - c. Front nasional akan mengadakan kampanye secara besar-besaran untuk membubarkan kabinet
  - d. Apabila rencana yang diajukan di atas gagal, maka segera diadakan demonstrasi secara besar-besaran oleh buruh tani, tentara dan perkumpulan-perkumpulan yang lain yang dapat dibujuk untuk bergerak bersama-sama.

Demonstrasi secara besar-besaran ini hendaknya diikuti dengan suatu pemogokan umum dan jika perlu dengan langkah-langkah kekerasan.

1. Dalam tindakan ramai-ramai ini, kaum buruh, petani, dan prajurit yang mengambil bagian akan menjalankan rencana kita sepenuhnya.
2. Kader-kader tentara yang memimpin tindakan-tindakan secara bersama dan beramai-ramai hendaknya sudah pernah mempunyai pelajaran politik dan ideologi sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan buat mereka.
3. Tindakan rama-ramai ini hendaknya diadakan hanya dalam kawasan dimana mempunyai sedikit kekuatan militer agar dapat mengimbangi kekuatan musuh.

Jika sekiranya usaha-usaha ini menemui kegagalan maka FDR mempunyai pilihan kedua yaitu penggunaan kekuatan militer dengan rencana-rencana sebagai berikut :

1. Menarik sebagian dari “*our trope*” dari daerah front (daerah *status quo*)<sup>43</sup>
  - a. Brigade Martono dan Jadau akan diperintahkan untuk memperkuat operasi intern kami.
  - b. Jika kita dipaksa untuk mengirimkan tentara ke front maka pasukan-pasukan yang belum kita percaya sepenuhnya akan dikirim.
2. Memindahkan pasukan-pasukan kita ke daerah yang kita pandang strategis dan menarik daerah-daerah yang tidak dapat dipertahankan.
  - a. Daerah Madiun akan dijadikan basis gerilya untuk perjuangan jangka panjang.

---

<sup>43</sup> Garis pembagian wilayah RI-Belanda dari hasil perjanjian Renville yang disepakati sebagai garis demarkasi dimana pasukan militer dari kedua pihak dilarang melintas atau menduduki wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah kekuasaan.

- b. Kita harus menempatkan paling sedikit 5 batalyon di Madiun, yang harus sudah dilaksanakan bulan ini (Juli atau bulan Agustus)
  - c. Kita akan membuat Solo(Surakarta) sebagai wild west untuk menarik perhatian kesana, tetapi kita harus mempunyai pasukan terkuat disana sehingga kekuatan de facto selalu di tangan kita.
  - d. Kedu, Yogyakarta, Pati, Semarang, Bojonegoro, Surabaya dan kediri (daerah-daerah RI) akan dijadikan daerah netral, pengertian kalau kita akan memperkuatnya atau meninggalkannya. Pasukan di daerah-daerah ini tidak boleh lebih dari dua batalyon.
  - e. Kita akan meninggalkan seluruhnya daerah Malang, Banyumas, dan Pekalongan.
3. Di samping pasukan resmi, sekarang kita harus mulai membangun pasukan rakyat dalam pengertian yang seluas-luasnya. Umumnya kita akan membangun pasukan-pasukan ini secara ilegal.
- a. Dalam setiap kecamatan yang kita anggap strategis letaknya dimana pengaruh kita telah berakar, kelompok terdiri dari 60 orang prajurit di bawah pimpinan seorang komandan.
  - b. Keenam puluh orang ini akan dipecah menjadi 6 atau 10 orang, dan dikirim ke desa-desa.
  - c. Pimpinan umum di kecamatan ini berada di bawah komandan yang mewakili buruh, tani dan komandan keenam puluh prajurit ini.
4. Program tingkat kedua ini akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan keadaan. Kita harus menyadari sebelumnya akan program nasional kita, terutama yang berhubungan dengan agrarian reform, pertahanan rakyat dan perjuangan buruh.<sup>44</sup>

Surakarta seperti terbagi menjadi tiga basis kekuatan yang berbeda dan ketiganya terlibat dalam konflik politik yaitu FDR di bawahi oleh Amir Syarifudin, GRR di bawahi oleh Tan Malaka dan Pemerintah Republik di bawah kabinet Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dengan program Rasionalisasinya

---

<sup>44</sup> Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, ( Jakarta : Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press, 1995), hlm. 340-343.

meresahkan FDR dan badan-badan perjuangan, kondisi ini dapat dimanfaatkan FDR untuk kemudian kembali mewujudkan rencana *wild west* nya di Surakarta yaitu dengan propaganda pemogokan buruh pabrik karung goni di Delanggu 26 Februari hingga 18 Juli 1948<sup>45</sup>. Aksi FDR berlanjut dengan penggeroyokan terhadap Martosujud dan Sumarto karena tindakkannya menyelamatkan tanaman kapas yang dibiarkan terbengkalai oleh aksi pemogokan buruh itu, penggeroyokan juga terjadi pada Haji Buzairi yang dituduh menggerakkan buruh tani dari STII (Sarekat Tani Islam Indonesia).<sup>46</sup>

Kekacauan di Surakarta bermuara pada bentrokan dan kontak senjata antara kesatuan tempur Panembahan Senopati dan Kesatuan Siliwangi yang akan dijelaskan sebagai kajian utama dalam tulisan ini, namun di luar itu kekacauan di Surakarta masih terus berlanjut sesuai dengan rencana *wild west* yang disusun FDR sebagai bentuk protes terhadap kabinet Muhammad Hatta. Bentrok antar badan perjuangan yang terjadi di Surakarta diawali dengan penculikan terhadap Dr. Muwardi dan beberapa anggota Barisan Banteng yaitu Citromargoso, dan Darmosalimin yang hilang pada 14 September 1948 pukul 05.00 dan menyusul hilangnya Sastronegoro pada pukul 23.30.<sup>47</sup> Ketiga korban ditahan di kampung Sudiroprajan, Sastonegoro berhasil lolos sedang dua rekannya ditemukan tewas di pemakaman Griwilan, kampung Joyotakan. Sehari kemudian tanggal 15

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Suyatno, “Masyarakat Daerah dalam Revolusi Indonesia”; Aspek Revolusi Sosial dalam Revolusi Nasional. *Prisma*, No.8 ,1984, hlm. 68.

<sup>47</sup> Julianto, *op. cit.*, hlm. 176.

September Barisan Banteng menyerbu markas Pesindo di daerah Gladag dan berhasil menghancurkan kekuatan Pesindo serta menguasai Markas Pesindo di Gladag dan Singosaren. Penyerbuan ini yang kemudian melibatkan campur tangan TLRI, dan Siliwangi serta Panembahan Senopati hingga terjadi konflik militer di Surakarta.<sup>48</sup>

Di Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri kekacauan dan keresahan masyarakat terjadi dengan adanya aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para pamongpraja<sup>49</sup> yang dilakukan oleh TLRI pimpinan Ahmad Yadau dan Suhodo di mana keduanya adalah simpatisan FDR yang menjadi induk kekuatan oposisi pemerintah. Pamongpraja yang diculik dari Sukoharjo dan Wonogiri itu kemudian ditahan di Tirtomoyo dan Tegalombo berjumlah sekitar 279 orang yang kemudian disiksa dan dibantai secara sadis oleh para pelaku kriminal dari kesatuan TLRI tersebut. FDR juga melakukan pembersihan bersama kesatuan tentaranya di pusat kota Surakarta dengan membunuh lawan-lawan politiknya dari GRR cabang Solo yang bermarkas di Laweyan. Usaha pembunuhan juga dilakukan terhadap anggota GRR lain seperti H. Susanto namun tidak berhasil. FDR semakin tidak terkendali dengan masuknya tokoh lama PKI yang datang dari Praha bersama Suripno pada 3 Agustus 1948, pemain lama bernama Muso yang meninggalkan tanah air sejak 1935 dan bermukim di Moskow itu langsung mengambil alih pimpinan FDR dan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Puluhan pegawai negeri dari daerah Karesidenan Surakarta menjadi korban pemberontakan PKI antara lain Bupati Sukoharjo Suwarno Honggopati Tjitrohupojo, Patih Sukoharjo R.M.T.H Hardjodiningrat, Wedana Sukaoharjo Prodjosendo, dan beberapa Assisten Wedana dan Wedana dari Kabupaten Wonogiri. Lihat lampiran 1 : Arsip Kodam VII Diponegoro, *Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta, 18-9-1948*.

menjadikannya organisasi Komunis. Gerakan Muso ini kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan gabungan dari FDR, Partai Buruh, Partai Sosialis dan Pesindo menjadi kekuatan bersenjata yang dimiliki PKI. Dalam menciptakan suasana revolusi Muso memandang perlu untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk menyelenggarakan rapat-rapat massa, dan melakukan agitasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kampanye kelilingnya pada 7 September 1948 mempertemukan Muso dengan para komandan dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati, dan seolah mendapatkan dukungan dari KPPS, esoknya Muso berbicara lantang dalam rapat raksasa di Madiun yang intinya menyalahkan dan menentang pemerintah yang tidak mengikutsertakan proletariat dalam perjuangan kemerdekaan dan tidak menjadikannya sebagai bagian dari sejarah revolusi bangsa Indonesia.<sup>50</sup> Puncak dari sepak terjang Muso bersama PKI dan pendukungnya adalah pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dalam bab selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut.

Kelanjutan *wild west* Surakarta terus berjalan seiring rencana-rencana FDR/PKI untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Tiga pilar kekuatan utama di Surakarta yang dipegang oleh FDR, Panembahan Senopati dan GRR kini berubah arah dengan menghilangnya pengaruh GRR Tan Malaka, dan bergabungnya FDR dan Senopati melawan kekuatan pemerintah yang dikendalikan oleh kabinet Muhammad Hatta dan dikawal oleh Siliwangi A.H.Nasution dalam melaksanakan langkah-langkah kebijakannya. Ketidakseimbangan kekuatan dan kapasitas serta dukungan menyebabkan

---

<sup>50</sup> Himawan Soetanto, *op.cit.*, hlm. 193.

Panembahan Senopati yang berbaris bersama FDR sebagai kekuatan militer yang menjadi korban Rasionalisasi Muhammad Hatta berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Prajurit siliwangi tidak terlepas dari faktor penyebab kekacauan di Surakarta dan sekitarnya karena menurut beberapa laporan bahwa ada beberapa prajurit Siliwangi yang dengan sengaja membuat kerusuhan dengan tindakan kriminal, membeli tidak membayar, merampok dan tidak disiplin sehingga menjadi alasan politis untuk melakukan serangan terhadap Siliwangi.<sup>51</sup> Alasan terkuat serangan Panembahan Senopati terhadap Siliwangi adalah terjadinya penculikan-penculikan terhadap perwira-perwira Panembahan Senopati yang kemudian tuduhan pelakunya mengarah pada Pasukan Siliwangi Batalyon Rukman di Tasikmadu. Serangan ini menjadi awal pertempuran atau perang saudara sesama TNI AD dan menjadi ukuran keberhasilan FDR dalam melancarkan rencana *wild west* nya di Surakarta.

---

<sup>51</sup> Soe Hok Gie, *op. cit* ., hlm. 238.